

TEMBAK DITEMPAT DAN HAK ASASI MANUSIA

Masril

Fakultas Syariah IAIN Bengkulu

Abstract: *Shooting on sight and Human Right.* The practice of shooting on sight was implemented in the past, Indonesia is a consitutional country (rechstaat) and not authoritarian country (machstaat). The Dead Penalty in Indonesia is mentioned in article 10 KUHP, and was implemented, but the process should be implemented in the sense of presumption of innocence, initiated by investigation and ended with binding decisions. Is the present practice of shooting on sight whether in accordance with the law? In addition, do not violate the human right. The practice of law in constitutional country such as Indonesia should be guaranteed.

Keywords: shooting on sight, human right, state law

Abstrak: *Tembak Ditempat dan Hak Asasi Manusia.* Praktek tembak ditempat (PTT) pernah terlaksana di Indonesia, Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) dan bukan negara atas kekuasaan belaka (machtstaat). Hukuman mati di Indonesia ada (pasal 10 KUHP) dan pernah dilaksanakan, namun prosesnya berdasarkan hukum yang ada dan berlaku sesuai dengan asasnya diantara asas praduga tak bersalah, yakni dimulai dari penyidikan dan diakhiri dengan suatu putusan yang mengikat. Praktek tembak ditempat apakah telah sesuai dengan hukum, sehingga tidak melanggar hak dan asasi manusia yang ada pada manusia tersebut. Hukum membatasi hak asasi manusia, karena kepastian hak asasi manusia lebih terjamin dalam negara hukum.

Kata Kunci: Tembak di Tempat. Hak asasi, Praduga Tak Bersalah, Negara Hukum.

Pendahuluan

Kita masih ingant dengan kejadian akhir tahun 1983 dan awal tahun 1984 (harian Republika), yakni dengan adanya Petrus (Penembakan misterius) terhadap para penjahat atau mematikan penjahat tanpa putusan pengadilan¹. Kemudian pada harian yang sama menuliskan, praktek tembak ditempat (PTT), hal ini tidak terlepas dengan apa yang diucapkan oleh Kapolri (kepala kepolisian Republik Indonesia), waktu itu Bapak Mayjend Polisi Dibyو Widodo tentang situasi gawat, kalau penjahat melawan ya kita tembak

dong². Hal senada juga hampir setiap tahun adanya pernyataan yang hampir sama, terutama menjaga ketertiban terhadap bajing loncat pada waktu mau lebaran, misal di Bengkulu, Kapolda: Perampok tembak ditempat. Jamin pemudik aman lintas Biduriang³, kemudian begal tembak ditempat⁴Memang kita sadari bahwa polisi dalam menjalankan tugasnya mempunyai hak untuk melumpuhkan orang yang mau ditangkap bila orang yang bersangkutan mengadakan perlawanan atau melarikan diri, namun demikian ada standar

¹.Harian Republika tanggal 14 April 1997 H 5 kolom 5

².Ibid h 1

³.Harian Raknyat Bengkulu, Sabtu 26 Juli 2014, h.25

⁴. Berita berjalan metro TV jam 15.30 tanggal 16 Maret 2015

operasinya (SOP). Hal diatas bisa dikatakan suatu usaha prepentif terhadap kejahatan.

Masih pada harian yang sama (Republika), dengan judul tentang membasmi kejahatan V.S tegakan hak asasi manusia, dimana dari 191 responden, 32,2 % responden memilih bahwa PTT (praktek tembak ditempat) bukanlah melngar hak asasi manusia dan sebaliknya penjahatlah yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia⁵. Terakhir baru-baru ini (awal tahun 2015 hampir semua media elektronik dan cetak membicarakan terhadap hukuman mati yang telah dieksekusi, namun kedua hal ini tidak sama prosesnya dan berbeda posisinya.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum (rechtstaat) dan bukanlah negara atas kekuasaan belaka (machtstaat)⁶, dengan arti kata negara dalam melaksanakan pemerintahan selalu berdasarkan hukum, termasuk diantaranya tentang peradilan. Seseorang baru dikatakan bersalah melanggar suatu delik hukum setelah adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum mengikat atau inkrah, hal ini

sesuai dengan salah satu asas yang terkandung dalam sistim hukum pidana kita, yakni asas praduga tak bersalah⁷, dengan arti kata kepada tersangka yang akan dieksekusi terhadap kesalahannya harus ada suatu proses peradilan, walaupun tersangka sudah sering melakukan tindak pidana (keluar masuk penjara) atau residifis dan putusan yang dimaksud diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan akhirnya putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Asas Praduga Tak Bersalah

Ini adalah suatu asas yang dianut dalam hukum acara pidana kita (UU No. 8 Tahun 1981), yang diambil (adopsi) dari Undang-undang pokok kekuasaan kehakiman (UU no. 14 tahun 1970) yang diperbaiki dengan UU No.4 Tahun 2004.(UU tentang Kehakiman) dan kemudian diganti dengan UU No.48 Tahun 2009. Hal ini merupakan yang baru dalam Hukum Acara Pidana kita dan merupakan salah satu dari sekian banyak hal.yang melatar belakangi perubahan dari HIR ke KUHAP

Yang dimaksud dengan asas Praduga Tak Bersalah ini (Pramsumtion of

⁵. Lokcit h 1

⁶. Pada UUD 1945 yang belum diamandemen hal ini dicantumkan dalam penjelasan umum, bahagian sistem pemerintahan negara bahagian I angka 1 Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat) dan dalam UUD 1945 yang telah diamandemen dicantumkan dalam pasal 1 ayat 3, yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum

⁷ Dalam undang-undang pokok-pokok kekuasaan kehakiman (UU No.4 tahun 2004), pasal 8 merumuskan, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan cukup jelas

innonsen.) adalah suatu asas yang menyebutkan seorang yang disangka melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah sebelum adanya suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan mengikat (inkracht) terhadap perbuatan yang disangkakan kepadanya. Suatu putusan dikatakan inkrach adalah suatu putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam persidangan yang dilaksanakan sesuai ketentuan, dimana putusan tersebut telah bisa di eksekusi atau dilaksanakan sesuai dengan amar putusan. Putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ini bisa terjadi pada putusan Pengadilan Negeri atau pada putusan Pengadilan Tinggi (putusan banding) atau pada putusan Kasasi di Mahkamah Agung. Putusan pengadilan negeri mempunyai kekuatan hukum mengikat bila telah liwat dari 7 (tujuh) hari semenjak salinan putusan diterima oleh terdakwa atau pada sidang yang dihadiri oleh terdakwa belum lewat 7 hari semenjak putusan tersebut diucapkan, dengan arti kata terdakwa tidak mempergunakan haknya dalam bidang hukum untuk banding, begitupun selanjutnya dengan putusan banding maupun kasasi.

Dengan arti kata pada asas ini tidak ada pembedaan atau eksekusi yang mendahului putusan pengadilan, apalagi tembak ditempat sebagaimana yang disinggung pada pendahuluan.

Proses Persidangan Sampai Dengan Adanya Putusan Tetap

Dalam hukum pidana Indonesia ada dikenal dengan tindak pidana umum dan ada tindak pidana khusus. Dalam tindak pidana umum suatu kasus pidana harus didahului proses oleh penyidik, yakni penyidik sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) atau undang-undang No. 8 Tahun 1981, sedangkan terhadap tindak pidana yang terdapat diluar KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) atau yang sering disebut dengan tindak pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi boleh dilakukan oleh penyidik polisi atau penyidik dari Kejaksaan atau pnyidik dari KPK (komisi pemberantasan korupsi). Jadi dalam tindak pidana umum harus dimulai proses berita acara pemeriksaan (BAP) dari penyidik polisi, stelah itu baru dilimpahkan ke kejaksaan, Jaksa penuntut umum mempelajari dan membuat surat dakwaan untuk dilimpahkan kePengadilan untuk diminta disidangkan dan diputuskan.

Penyidik dalam melakukan tugasnya untuk membuat berita acara pemeriksaan berdasarkan ketentuan undang-undang dan menyerahkan berkas perkara ke Penuntut umum (pasal 8 ayat 2 KUHAP)⁸ dan

⁸ Pasal 8 KUHAP merumuskan (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini, (2) Penyidik menyerahkan

penuntut umum mempelajari berkas yang dilimpahkan oleh penyidik tersebut tentang telah sempurna atau belumnya BAP tersebut. Tindakan mempelajari tersebutlah yang sering disebut dengan *prapenuntutan*. Bila menurut penuntut umum menganggap BAP yang dilimpahkan oleh penyidik kepadanya ada kekurangan, maka penuntut umum mengembalikan kepada prnyidik untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk yang diminta oleh Jaksa penuntut umum serta tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang.⁹ Dan setelah itu penyidik mengembalikan kepada penuntut umum dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, selanjutnya penuntut umum membuat surat dakwaan dan kemudian dilimpahkan kepengadilan yang sesuai dengan kompetensinya untuk disidangkan dan diputuskan.¹⁰ Yang

dimaksud dengan kompetensinya adalah tentang pengadilan yang berwenang untuk mengadilinya, misal antara pengadilan negeri Bengkulu dengan pengadilan negeri Seluma mana yang berwenang.

Setelah pengadilan negeri menerima limpahan perkara dari penuntut umum, maka ketua pengadilan negeri mempelajarinya (termasuk mempelajari kewenangannya untuk mengadili (pasal 147,148 KUHP).¹¹ Bila pengadilan yang bersangkutan merasa berwenang untuk mengadilinya, maka ketua pengadilan negeri membentuk majelis hakim yang akan menanganinya, ketua pengadilan negeri juga mempunyai hak untuk mengadili bila ia termasuk dalam majelis

daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila sebahagian tempat saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang dalam daerah tindak pidana itu dilakukan. (3). Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan tersebut masing-masing berwenang untuk mengadili perkara pidana itu. (4). Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri, dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

¹¹.Pasal 147 KUHP merumuskan, Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya. pasal 148 KUHP merumuskan (1). Dalam hal ketua pengadilan berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lainnya ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lainnya yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya.

berkas perkara kepada penuntut umum, (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakuka: a.Pada tahap pertama hanya menyerahkan berkas perkara, b Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

⁹. Pasal 138 KUHP merumuskan (1).Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukannya kepada penyidik apakah hasil penyidikan tersebut sudah lengkap atau belum. (2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

¹⁰ Pasal 84 KUHP merumuskan (1) Pengadilan berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. (2) Pengadilan negeri yang didalam

tersebut. Majelis inilah yang akan menentukan hari sidang dan memberitahukan kepada Jaksa Penuntut umum untuk bersidang dan menghadirkan tersangka sesuai dengan undang-undang.

Hakim dalam menyidangkan terdakwa biasanya berjalan dalam beberapa kali persidangan dan juga sangat tergantung dengan jumlah saksi dan berat ringannya suatu kasus. Setelah kasus ini diputus oleh hakim dalam suatu persidangan, maka putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum, karena masih ada hak terdakwa yang harus diberikan sesuai dengan ketentuan undang-undang¹². Tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk menyatakan banding tersebut adalah¹³ tujuh hari setelah diucapkan. Bila waktu yang diberikan telah lewat, maka hak terdakwa untuk banding gugur dan terdakwa telah berubah menjadi terpidana (bersalah). Begitupun selanjutnya dengan putusan banding dan kasasi. Bila putusan telah inkrah (mempunyai kekuatan hukum mengikat)

maka putusan bisa dilaksanakan (eksekusi) sesuai dengan amarnya.

Hak Azasi Manusia

Mengenai perumusan hak asasi manusia sampai sekarang belum ada suatu defenisi yang standar (baku), setiap orang mengemukakan defenisi yang berbeda dan sangat tergantung dari sudut pandang seseorang. Dan bila dilihat dari beberapa defenisi yang ada pada hakekatnya membicarakan hak yang ada pada manusia sebagai makhluk hidup.

Prof.Darji Darmo Diharjo memberikan pengertian bahwa hak azasi adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa¹⁴, sedangkan A. Mansur Efendi, memberikan defenisi, bahwa hak azasi manusia adalah hak milik bersama umat manusia yang diberikan oleh Tuhan untuk selama hidup¹⁵. Dari dua pengertian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang diberikan oleh Tuhan atau hak asasi manusia adalah manifestasi hak istimewa manusia yang dibawah semenjak lahir sehingga tidak dapat tidak harus berada pada manusia atau tidak dapat dipisahkan dari manusia.

Namun dalam perkembangan selanjutnya mungkinkah hak-hak dasar

¹² .Pasal 67 KUHAP merumuskan terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Permintaan banding tersebut dapat diajukan ke pengadilan tinggi (lihat pasal 233 ayat 1 KUHAP).

¹³ Pasal 233 ayat 2 merumuskan hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat 1 boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 196 ayat (2) KUHAP

¹⁴ Bp 7 Pusat. Bahan penataran P.4 Undang-undang Dasar 1945 h. 20, 21, BP.7 1994

¹⁵ Efendi Masyhur. Tempat hak asasi manusia dalam hukum Internasional / Nasional halaman 20. Alumni Bandung 1980.

yang diperoleh semenjak lahir tersebut dapat dipertahankan, sebab dalam kenyataannya antara orang yang satu dengan yang lainnya memandang hak dasar yang dibawah semenjak lahir tersebut berbeda, apalagi lingkungan keberadaan sangat berbeda, shingga apa yang dikatakan oleh Thomas Hobbes manusia yang satu adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*) dan untuk itulah dibuat suatu aturan atau hukum yang mengatur tentang kehidupan manusia dan pembatasannya dan yang melanggar aturan tersebut dikenakan sanksi, sehingga manusia tidak bebas lagi untuk mempergunakan haknya demi untuk kehidupan bersama. Hak mana diatur oleh suatu aturan. Dalam konsep negara hukum, hukum harus diperhatikan, karena hukum merupakan panglima dan dengan hukum kepastian jaminan tentang hak asasi lebih terjamin dan mana yang merupakan hak asasi dan mana yang tidak telah diatur secara legalitas dalam hukum, sehingga antara hak asasi dan hukum tak dapat dipisahkan, sebab hukumlah yang menjamin tentang pelaksanaan hak tersebut, hukumlah yang menjamin pengaturan penyelenggaraan hak-hak tersebut, dengan demikian hukum secara formilnya telah mengatur atau menyelenggarakan hak asasi tersebut.

Kalau dilihat dari kenyataan bahwa persoalan hak asasi atau menegakkan hak asasi akan tertumpu pada suatu areal

(kondisi), yakni bidang politik, karena hukum lahir adalah karena kesepakatan politik di lembaga negara kita (DPR)¹⁶ dan politik dalam prakteknya dibatasi oleh hukum. Dalam prakteknya adakalanya politik dengan hukum serta hak asasi manusia berjalan seiringan dan adakalanya berlawanan arah. Bila terjadi berlawanan arah (politik, hukum dan hak asasi manusia) sering dimenangkan oleh politik, misal kasus polisi dan KPK jilid pertama (kasus cicak dan buaya dll) dimenangkan oleh politik. Sebagaimana dikatakan A.Mansyur Efendi, dimana persoalan hak asasi manusia menjadi cukup kompleks aplikasinya, karena hak asasi manusia dimasuki unsur-unsur politik masing-masing negara¹⁷. Dari kenyataan antara hukum, politik dan hak asasi manusia akan selalu ditentukan oleh politik negara. Dengan demikian aplikasi (perwujudan) pelaksanaan hak asasi manusia itu akan berbeda pada masing-masing negara dan juga sangat tergantung kepada paham negara yang bersangkutan. Aplikasi dari hak asasi manusia dipengaruhi oleh pembangunan politik negara yang bersangkutan (misal tentang hukuman mati di Australia yang sekarang menghapuskan) kemudian dari politik suatu negara akan tergambar dalam sifat dan bentuk pemerintahan negara tersebut. Apabila negara yang bersangkutan negara hukum,

¹⁶ Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 DPR membuat UU.

¹⁷ Loksidi

maka segala sesuatunya dalam urusan negara harus berdasarkan hukum. Bahwa hukum yang baik adalah hukum yang menghormati hak asasi manusia, dalam arti kata hukum itu harus mengandung unsur-unsur hak, kewajiban dan tanggung jawab, antara ketiga unsur itu harulah merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.

Kalau dilihat dalam pergaulan hidup dan bertitik tolak dari defenisi hak asasi manusia yang telah dikemukakan terdahulu, maka dapatlah dikatakan, dimana disatu sisi hukum mematikan hak asasi manusia dan disisi lain menjamin terhadap kepastian hak asasi manusia. Dikatakan mematikan hak asasi manusia adalah terhadap perbuatan yang berlawanan dengan hukum tersebut, misal seseorang menikah belum cukup umur menurut hukum, maka pernikahannya telah melanggar hukum dan ada sanksinya, sementara pernikahan adalah hak dan menurut keyakinannya (agama) sudah membolehkan. Karena hukum merupakan kesepakatan bersama untuk membentuk aturan yang membatasi ruang gerak hak yang dimiliki. Dilakukan pembatasan karena setiap orang mempunyai kepentingan yang berbeda dan kemungkinan kepentingan tersebut bertentangan atau berlawanan dengan orang lain dan bila tidak diatur akan menimbulkan ketidak stabilan dalam hidup bersama. Dikatakan hukum melindungi hak asasi manusia karena aturan hukum

menjamin tentang pelaksanaan hak, dalam hal ini hak yang searah atau seirama dengan hukum yang dimaksud.

Ketentuan undang-undang yang memperhatikan hak asasi manusia

Pada bahagian ini penulis hanya mengaitkan perlindungan hak asasi manusia dengan tugas pelaksanaan hukum dalam pidana.

Sesuai dengan tujuan hukum pidana, dalam hal ini ada beberapa pendapat tentang tujuan hukum pidana, diantaranya Tirta Amidjaya, maksud diadakan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat¹⁸.

Ada beberapa ketentuan undang-undang yang melindungi terhadap hak asasi manusia:

1. Dalam pasal 1 ayat 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang redaksinya berbunyi”Tiada suatu perbuatanpun boleh dihukum, melainkan atas ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari pada perbuatan itu”. Pasal ini merupakan pasal induk dari pembedaan, dengan arti kata boleh hak asasi seseorang dilanggar asal ada undang-undang yang mengaturnya dan perbuatan orang tersebut ada dalam bunyi pasal tersebut. Pasal ini

¹⁸ Bambang Poernomo, Asas-Asas hukum Pidana, h:23, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1976

mengatasi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, mulai dari penyidikan dan berakhir dengan putusan dipengadilan. Dalam penyidikan, mulai dari pemanggilan sebagai pemberi keterangan, kemudian berubah jadi tersangka dan selanjutnya penangkapan serta penahanan harus dijelaskan dasarnya, yakni tidak pidananya dan pasal yang disangkakan. Justru itu penyidik dalam pemanggilan seseorang didalam surat panggilan harus ada dasar hukum tindak pidana yang diperisa, penangkapan, penahanan. Dalam kejaksaan melimpahkan kasus kePengadilan berupa surat dakwaan jelas pasal yang didakwaan. Terakhir pada hakim yang memeriksa dipengadilan harus jelas tindak pidananya. Hakim tidak dibenarkan memutus suatu kasus pidana bila dalam pembuktian lain dari surat dakwaan, misal dalam dakwaan dituduh pencurian (pasal 362 KUHP), tetapi dalam pembuktian terbukti melanggar pasal penggelapan (pasal 372 KUHP) yang unsurnya hampir sama, maka hakim tidak boleh mempidana, tetapi harus membebaskan

terdakwa, jadi disini ada perlindungan hukum.

2. Masih dari KUHP (pasal 1 ayat 1) dimana hukum pidana tidak berlaku surut, maksudnya kejadian-kejadian terdahulu sebelum undang-undang terbit dan berlaku, maka terhadap perbuatan terdahulu tersebut undang-undang tidak bisa diterapkan, misal undang-undang diberlakukan 1 Januari 2015, maka terhadap kejadian sebelum 1 Januari 2015 tidak bisa diterapkan atau mengkriminalisasikan seseorang terhadap suatu tindak pidana, memang dalam ayat 2 pasal ini kelihatan adanya sedikit pengecualian, dimana terjadinya perubahan undang-undang selalu diberikan kepada hal yang menguntungkan terdakwa, maksudnya sewaktu kejahatan diproses terjadi perubahan undang-undang, maka diberikan yang menguntungkan tersangka, misal dalam de kriminalisasi (bukan kriminalisasi), sebagai contoh seseorang melakukan tindak pidana jahat yang diancam dengan hukuman mati, kemudian terjadi perubahan undang-undang, dimana terhadap hukuman mati ditiadakan, sementara terdakwa belum diputus yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkrah), maka baginya

tidak dapat diancam dengan hukuman mati.

3. Dalam KUHAP (kitab undang-undang hukum acara pidana) cukup banyak pasal-pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia, karena KUHAP merupakan pelaksana dari KUHP, sehingga bila menyimpang dari pelaksanaannya adalah melanggar hak seseorang, misal Penyidik dalam melakukan penangkapan harus memperlihatkan surat perintah penangkapan (pasal 18 ayat 1 KUHAP) dll.
4. Dalam undang-undang pokok Kepolisian (UU No. 2 Tahun 2002) disebutkan dalam pasal (4). Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
5. Dalam undang-undang pokok Kejaksaan (UU No. 16 Tahun 2004) pada pasal 8 ayat (4) merumuskan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa

bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya, misal orang yang sedang diproses hak untuk solat tidak boleh dihilangkan dll..

6. Dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman (UU No.48 tahun 2009), juga banyak mengenai hak asasi manusia, diantaranya:
 - a. pasal 5 ayat (1), hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan arti kata hak seseorang yang berada dalam masyarakat harus diperhatikan.
 - b. Pasal 6 (1) Tidak seorangpun dapat dihadapkan didepan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain dan seterusnya sampai dengan pasal 13 UU No.48 tahun 2009.

Praktek Tembak ditempat dan Hak Asasi Manusia

Bila diperhatikan tentang hak asasi manusia sungguh banyak dimensinya

(sudut pandang), dalam hal tulisan ini disinggung tentang hak asasi manusia terhadap tembak ditempat. Terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak mengindahkan peringatan polisi atau melawan petugas yang berwenang dalam melaksanakan tugasnya. Kalimat diduga berarti yang bersangkutan belum tentu melakukan tindak pidana dan undang-undang kita juga memakai praduga tak bersalah (Pasal 1 ayat 14 KUHP, pasal 8 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009)¹⁹ dan bila dilihat uraian diatas harus adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat tentang bersalahnya seseorang. Dalam hal tulisan ini, dimana tersangka belum diputus oleh pengadilan atau belum dibuktikan tentang bersalahnya seseorang, bila terbukti bersalah dan divonis oleh pengadilan bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka status baru dikatakan terpidana. Bagaimana halnya dengan orang yang ditembak ditempat (belum disidangkan), apalagi tembak ditempat tersebut mengakibatkan matinya orang tersebut (seakan orang tersebut telah menjalankan pidana mati), memang pidana mati di Indonesia masih berlaku (pasal 10 KUHP) tetapi melalui proses peradilan dan adalagi kode etik yang diterapkan untuk melaksanakan hukum tersebut.

Polisi dalam menjalankan tugasnya tak terlepas dari ketentuan undang-undang

sebagaimana yang telah diuraikan diatas, yakni menjunjung tinggi hukum negara.

Kembali kepada kejadian akhir tahun 1983 dan awal 1984 sebagaimana pada pendahuluan, yakni dengan adanya petrus (penembak misterius), tindakan tersebut melakukan penembakan terhadap penjahat atau mematikan penjahat tanpa putusan pengadilan dan pelaku penembakan tidak diketahui identitasnya, yang ada hanya korban. Hal tentang pemberlakuan penembakan ditempat (misterius ini) baru diketahui setelah Presiden Suharto dalam otobiografinya, pikiran, ucapan dan tindakan saya (1989) secara implisit mengakui penembakan penjahat itu sebagai upaya aparat pemerintah mengembalikan rasa aman warga yang telah dicabik-cabik oleh praktek-praktek yang menjijikan²⁰ yang pada akhirnya petrus tersebut tidak kedengaran lagi.

Dengan adanya praktek tembak ditempat pada waktu itu, apakah tingkat kejahatan habis atau para pelaku kejahatan bisa jera atau takut untuk melakukan tindakannya. Perkembangan berita di media masa waktu itu lebih sadis dan bringas, seperti kasus Rohadi, pak datuk di Medan dll.

Tahun 1997 timbul istilah praktek tembak ditempat (PTT), apakah modelnya sama dengan petrus tahun 1984, yang jelas

kasus ini sudah terlaksana di Surabaya (dilaporkan) 28 penjahat tewas ditembak, 28 lainnya terluka dan 11 hilang²¹, sementara penyidik sebagaimana yang telah disinggung terdahulu melakukan tindakan yang dimaksud bila yang diduga melakukan tindak pidana sewaktu mau ditangkap berupaya melarikan diri atau melawan yang akan mengancam keselamatan petugas.

Praktek tembak ditempat seakan suatu vonis yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tanpa sidang pengadilan. Perbuatan tersebut bukanlah suatu undang-undang, tetapi suatu perintah atasan. Lahirnya suatu undang-undang tentu berbeda dengan suatu perintah. Undang-undang lahir melalui suatu mekanis yang akhirnya ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan, sementara perintah banyak merupakan kebijakan.

Sebagaimana disinggung pada awal tulisan ini, yakni Indonesia adalah negara hukum, dengan arti kata segala aspek terjangnya adalah berdasarkan hukum, maka segala kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai atau diatur oleh hukum tidak dibenarkan. Sedangkan orang yang belum dihadapkan kedepan sidang pengadilan adalah terdakwa dan bukan terpidana (praduga tak bersalah).

Memang pada kenyataannya pelaku tindak pidana adalah orang-orang yang

merampas hak-hak korban, namun demikian pelaku tindak pidana tersebut adalah subjek dalam menerapkan hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban, maka baginya juga berlaku hukum, maka hukumlah yang akan mengatur atas perbuatannya, sehingga bila baginya tidak diberlakukan hukum akan terjadilah pelanggaran terhadap hak asasi.

Jenis Hukuman

Dalam hukum pidana juga memakai hal sebagaimana diatas, yakni adanya aturan tertulis yang harus ditaati yang bersifat legalitas, bahkan pasal 1 dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah disinggung diatas) Hal ini menghendaki adanya suatu kepastian hukum, begitupun dengan jenis hukuman yang akan diterap harus adanya kepastian hukum.

Hukum adat adalah hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat(living law)²²pada dasarnya tidak tertulis, apakah ini bisa dilaksanakan yang sesuai dengan asas legalitas. Dalam bidang hukum perdata bisa dilaksanakan, namun dalam hukum pidana tidak bisa dilaksanakan. Sebagai contoh seseorang yang tertangkap sedang mesum (pelaku bukan suami isteri), apakah ini boleh dirajam, karena penduduknya mayoritas Islam dan menganggap hukum islam yang telah diresepsi kedalam hukum adat dan

²¹ . Ibid H 1 Kolom 5

²² Soepomo.....

beranggapan bisa untuk dilaksanakan. Kalau kita konsen dengan asas legalitas maka yang tertulis saja yang bisa dilaksanakan. Namun demikian ada satu undang-undang (UU Drt No. 1 Tahun 1951), dimana dalam pasal 3 UU tersebut membolehkan untuk diterapkan hukum adat (pidana adat), dengan ketentuan pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih dari tiga bulan penjara.

Pasal 10 KUHP (tentang jenis hukuman) merumuskan:

- a. Hukuman pokok
 - 1e.Hukuman mati
 - 2e.Hukuman penjara
 - 3e.Hukuman kurungan
 - 4e.Hukuman denda
 - b. Hukuman-hukuman tambahan
 - 1e. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
 - 2e. Perampasan barang yang tertentu
 - 3e. Pengumuman keputusan hakim.
- Bila dilihat dari redaksi pasal

tersebut, memang ada hukuman mati, tetapi konteknya berbeda dengan dengan tembak ditempat. Yang tecantum dalam pasal 10 KUHP ini adalah melalui suatu proses persidangan yang diputus oleh pengadilan seperti pelaksanaan hukuman mati terhadap gembong narkoba yang membuat agak terganggunya hubungan Australia dan Brasilia dengan Indonesia..

Penutup

Berdasarkan hal diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Seorang terpidana yang mau dieksekusi harus melalui putusan Pengadilan
2. Polisi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan diperkenankan melakukan tindakan ditempat yang bertanggung jawab (pasal 5 ayat 1 huruf a bahagian 4, pasal 7 ayat 1 bahagian j KUHP dan pasal 16 ayat 1 bahagian i UU Pokok Kepolisian), seperti melumpuhkan sesuai dengan standar operasinya.
3. tembak ditempat yang tidak melalui prosedur hukum merupakan pelanggaran terhadap hak asasi.

Referensi

BP.7. Bahan penataran P4

Efendi, Masyhur, Tempat hak asasi manusia dalam hukum Internasional/nasional. Alumni Bandung 1980.

Abdurrahman, 1984. Hukum Adat Menurut perundang-undangan Indonesia, Cendana Perss Jakarta

Harian Repulika

Harian Raknyat Bengkulu

UU No 8 Tahun 1981, tentang KUHP

KUHP

UU No, 48 tyahun 2009 Tentang Pokok Kekuasaan kehakiman

MIZANI Vol. 25, No.1, Februari 2015

UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
Republik Indonesia

UU No. 2 Tahun 1999 Tentang Kepolisian
Republik Indonesia

UU Drt. No. 1 Tahun 1981 Tentang
penerapan hukum adat.

Metro TV